
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro

Oleh:

Ega Miranti Ponga¹

Sarah Sambiran²

Ismail Sumampow³

Abstrak

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomotif pembangunan nasional terutama daerah pedesaan. Untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa tapi di dalam semua program pembangunan masih tidak terealisasi dengan baik dan benar dengan berbagai masalah seperti masalah transparansi, ketidakpuasan masyarakat atas hasil pembangunannya, kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat desa. Atasnya penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di desa minanga kecamatan tagulandang utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam segi efektivitas, semua program yang di bangun oleh pemerintah sudah berjela dengan sangat baik, namun ada beberapa program yang di bangun oleh pemerintah dalam pelaksanaan ataupun pengawasannya masih kurang baik. Dalam hal efisien setiap program pembangunan infrastruktur sudah sangat baik juga semua program yang dijalankan sudah terealisasi dengan sangat tepat dan efektif, dan anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun semua anggaran tersebut berasal dari dana desa. Beberapa program belum terealisasi atau memenuhi kebutuhan, yakni program dari pemerintah mengenai pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan yang cukup lama belum terealisasi dengan baik.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Infrastruktur

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Infrastruktur Merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup, segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam pasal 2, bahwa Pembangunan infrastruktur Mencakup Tiga (3) hal yaitu Prasarana dan sarana Perhubungan, Prasarana dan Sarana Pengairan, dan Prasarana dan Sarana Permukiman. Ditambah lagi dengan adanya 2(dua) mata yang harus dimiliki dalam penyediaan infrastruktur, yaitu mata fisik dan mata pelayanan. Infrastruktur tidak selesai dibangun secara fisik saja, namun menuntut adanya operasional dengan mengedepankan kualitas pelayanan jasa dan efektivitas pengelolaan infrastruktur. Melihat begitu banyaknya peran maupun dimensi permasalahan serta tantangan dalam pembangunan infrastruktur, maka perlu diupayakan pencegahan guna meminimalisir munculnya permasalahan.

Pembangunan desa sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong-royong. Selanjutnya Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka Panjang, menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu) tahun sekali, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan Merupakan suatu proses yang dinamis, selain itu pembangunan di tunjukan sebagai suatu usaha kearah peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang baik, tetapi apabila tujuan pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang kurang baik bagi masyarakat, maka pembangunan itu akan sia-sia. Tujuan dalam pembangunan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan pedesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dapat dirumuskan pembangunan perdesaan ditunjukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara Berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan .

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh di katakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi bermasyarakat setempat beserta aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam artian, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus ruma tangga desanya sehingga bisa mandiri. Selain sebagai perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan maka aparatur pemerintah desa juga berperan sebagai pelayanan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang di miliki daerah tersebut. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah yang di tunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah atau desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi di tunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu desa, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan

mempengaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di pedesaan dilakukan. Pembangunan desa yang terencana dan terkendali sangat diperlukan agar proses pembangunan desa tersebut berhasil dan memilih output yang efektif. Pentingnya hal tersebut juga harus di dukung oleh kebijakan pemerintah yang baik, tapi tidak cukup jika hanya kebijakan pemerintah yang baik karena sebaik apapun itu kebijakan pemerintah tetapi jika para pelaksana kebijakan itu kurang mampu menjalankannya maka akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan, Apabila kemampuan pemerintah desa tidak memadai maka proses pembangunannya cenderung mengalami kemacetan bahkan mungkin suatu kegagalan, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan mempengaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di pedesaan dilakukan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan di pedesaan dilakukan oleh pemerintah, Namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, ke depan pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat memenuhi dan masyarakatnya tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa kedepan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan atau ancaman yang dihadapi oleh desa.

Chief. J.O Udoji (Wahab,1997:5) mendefinisikan kebijakan pemerintah Berdasarkan pendapat diatas, kebijakan pemerintah adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah pemerintahan dengan menggunakan serangkaian

Tindakan yang berpola atau usaha yang dilakukan, baik oleh perseorangan maupun kelompok dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang banyak.

Program pembangunan di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara yaitu Pembangunan jln produksi susu lind.2 tahun 2017, Pembangunan Drainase dan plat deucker lind 1 tahun 2016, Pembangunan Gedung paud tahun 2018, Pembangunan rehab jalan setapak lind 1 dan 2 tahun 2018, Pembangunan jln produk singgio tahun 2017, Pembangunan jln wisata toka tahun 2018-2019 2019, Pembangunan talud abrasi pantai lind 1 tahun 2020, Pembangunan bahu jalan lind 1 dan 2 tahun 2016, Pembangunan drainase/saluran air lind.1 tahun 2018, Pembangunan Normalisasi sungai tahun 2015 lind.2, pembangunan talud bantaran sungai lind.1 tahun 2019, Pembangunan tambatan perahu tahun 2017, Dan pembangunan balai pertemuan umum (BPU) tahun 2016.

Untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa tapi di dalam semua program pembangunan masih tidak terealisasi dengan baik dan benar karena ada beberapa masalah yaitu: (1). Tidak maksimalnya pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur seperti tidak adanya transparansi Terhadap anggaran sehingga belum tercapainya tujuan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. (2). Masyarakat yang tidak merasa puas dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di desa seperti proses Pembuatan Tambatan Perahu yang sudah cukup lama belum terealisasi dengan baik, dan juga kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat desa sehingga dari program tersebut ada beberapa pembangunan yang masyarakat tidak merasa puas.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan

masalah pada Penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara?.

Lokasi penelitian di desa Minanga, konon Menurut cerita Turun Temurun nama penduduk pertama pulau Tagulandang adalah Dotu Mukapi (Tidak diketahui asal-usulnya) tinggal di lumbo yang dahulunya adalah bagian dari kampung minanga. Kampung Minanga adalah kampung tertua di pulau Tagulandang dan juga sekolah pertama didirikan di pulau tagulandang adalah kampung minanga dengan nama GOUVERMENEN VOLKSCHOOL tahun 1868 sekarang bernama sekolah dasar Gmist Bethel Minanga.

Nama minanga di ambil dari 2 versi yang berbeda menurut cerita turun temurun versi pertama adalah konon pada zaman dahulu para pelaut yang berlayar di pulau sangihe ke manado atau pulau Maluku sering singah di kampung minanga untuk menambah perbekalan berupa pisang yang banyak ditanam di kampung ini. Pisang tersebut dimasak dengan cara menggoreng di sekitar batu Manumpila atau Batu minanga. Kata minanga berasal dari Bahasa sangihe dialog Tagulandang yaitu “MANANGA” yang artinya menggoreng.

Konon batu minanga dianggap keramat karena ketika terjadi musim kemarau yang panjang, maka para tua-tua menyirami batu tersebut sambil memohon agar turun hujan. Sebaliknya apabila intensitas curah hujan cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir akibat meluapnya sungai minanga, maka para tua-tua memayungi batu minanga serta memanaskannya dengan api sambil memohon hujan berhenti. Juga ketika terjadi wabah penyakit menular, maka para tua-tua menyiram batu minanga dengan air serta memohon kesembuhan.

Setelah para Missionari dari benua Eropa datang ke minanga untuk menyebarkan agama Kristen, maka dibuatlah bangsal disekitar batu minanga untuk tempat memuja Tuhan yang Maha Esa. Dari peristiwa inilah lahir nama Gereja Bethel Minanga sampai saat ini

bernama jemaat Bethel Minanga terletak diantara dua tanjung nganga, pada akhirnya nama kampung tersebut disebut MINANGA.

Seiring dengan Perkembangan Zaman yang disertai dengan perubahan pola dan tata Pemerintahan sejak dari bentuk kerajaan Tagulandang dan terakhir menjadi bagian dari Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Luas wilayah yang ada di desa Minanga adalah 15,3 Km. Desa Minanga Merupakan Salah satu dari 6 kampung yang ada di kecamatan Tagulandang Utara.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembangunan infrastruktur di desa minanga kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro, dilihat dengan 3 kriteria penentuan kebijakan pemerintah yang dikemukakan oleh said Zainal Abidin (2004:56) yaitu: Efektifitas, yaitu mengukur alternative sasaran yang di capai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Efisiem, yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Terjawab, yaitu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan atau masalah tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Informan J.W Selaku Kepala Desa di desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro, dengan melihat dari Efektifitas yaitu Mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatie kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Pembangunan yang ada dan sudah di bangun yaitu: Drainase dan plat deucker lindongan 1 Tahun 2016, Pembangunan Jln Produksi susu Lindongan 2 Tahun 2017, pembangunan Gedung paud Tahun 2018, pembangunan rehab jln setapak lindongan 1 dan 2 tahun 2018, Pembangunan jln Produksi singgio tahun 2017, Pembangunan jln wisata Toka Tahun 2018-2019, Pembangunan talud abrasi pantai lindongan 1 tahun 2020, Pembangunan bahu jalan lindongan 1 dan

2 Tahun 2016, Pembangunan drainase/saluran air lindongan 1 tahun 2018. Pembangunan infrastruktur di desa minang sudah tepat sasaran .

Kemudian pada alternative kebijakan melalui Efisien yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Melalui wawancara dengan Informan H.T Selaku Sekretaris di kantor desa Minanga Mengatakan bahwa Anggaran yang di peroleh dalam setiap pembangunan infrastruktur di desa itu berbeda-beda dan berasal dari : Dana Desa, APBD, APBN, dan PNPM.PD Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ia juga mengatakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk pembangunan infrastruktur target yang di tentukan adalah 30 hari -90 hari kalender, tapi itu belum tentu selesai dalam jangka waktu yang ada dalam setiap pembangunan ada juga masih tergantung pada volume bangunan, semua infrastruktur sampai saat ini selalu tepat waktu. Dan juga Setiap Anggarannya berbeda-beda sesuai dengan volume kerjanya

Informan A.K Selaku Ketua MTK di kantor desa minanga ia juga mengatakan Masalah atau kendala yang ditemui dari Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan yaitu program pembuatan tambatan perahu yang sudah cukup lama belum terealisasi dengan baik , ada juga beberapa program pembangunan yang belum selesai karena ada beberapa infrastruktur tidak terlaksana dengan baik karena sebagian anggaran khusus di pakai untuk infrastruktur namun ada pengurangan karena adanya pandemic

covid 19. Sehingga ada beberapa belum terlaksana.

Berdasarkan wawancara dengan para pemuka desa Informan G.T Selaku Tokoh Masyarakat Pandangan kami terhadap Infrastruktur yang ada di desa masyarakat sangat antusias dan menerima dengan baik setiap pembangunan yang di laksanakan di desa minanga menurut saya pelaksanaanya masih kurang dan belum terlaksana sepenuhnya, juga dalam pengawasanya masih kurang. Pembangunan yang sudah di bangun di desa minanga kami selaku Tokoh Masyarakat sudah sangat puas terhadap pembangunan yang ada, juga kinerja dari para pemerintah sudah sangat baik dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

Informan E.M Selaku Tokoh pendidikan Pandangan kami terhadap Pembangunan yang ada di desa minanga sudah sangat baik dan efektif dalam mendorong pembangunan yang ada di desa kami, saya melihat ada permasalahan yang muncul pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah yaitu tambatan perahu bagi para nelayan karna ada pro dan kontra antara pihak masyarakat dan para pemerintah dan tidak transparansi mengenai anggaran yang belum terealisasi dengan baik. Pembangunan Infrastruktur yang di bangun di desa kami bisa dikatakan cukup maksimal dan dari pihak pemerintah selalu ada pengawasan dengan baik, kami sebagai Tokoh pendidikan merasa puas dengan pembangunan yang ada dan kinerja dari para pemerintah sudah cukup baik. kami selaku tokoh pendidikan merasa sangat terbantu dengan program dari pemerintah desa dan setiap anggaran berjalan sesuai dengan pembangunan yang ada.

Kemudian Pandangan kami selaku Tokoh Agama seperti yang dikatakan Informan L.G mengatakan Dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa minanga semuanya sudah berjalan dengan sangat baik ,terkadang dalam pembangunan infrastruktur terkadang ada masalah yang sering muncul saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur

ada yang berhasil tepat waktu dan juga ada yang tidak tepat waktu karena masalah kordinasi antara perangkat desa dan anggaran yang tidak begitu transparan.

Kinerja pembangunan infrastruktur yang ada di desa minanga sudah sangat baik, begitu juga dengan semua anggaran berjalan dengan baik masyarakat sudah sangat puas dengan pembangunan yang ada di desa minanga.

Informan M.P Selaku tokoh pemuda, pembangunan yang ada didesa kami baik dan kadang ada permasalahan permasalahan yang muncul pada saat pembangunan infrastruktur di desa salah satunya pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan sering terjadi pro dan kontra dari pihak masyarakat dan pemerintah, mengenai transparansi anggaran yang belum sepenuhnya berjalan dengan begitu baik.

Setiap pembangunan yang ada di desa minanga kami sudah merasa sangat puas dengan pembangunan yang ada , juga kinerja dari pemerintah terhadap pembangunan yang ada dan pengawasab dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik harus ada pengawasan ketat dari pihak pemerintah karena kendala utamanya adalah ketidak transparan dalam penggunaan dana.

1. Kriteria Penentu Kebijakan Secara Efektivitas

Pada kriteria Efektifitas yaitu mengukur sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Kebijakan melalui Efektifitas yaitu melihat bagaimana pembangunan yang di bangun di desa itu sendiri seperti drinese yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang rumahnya pinggiran dengan got, dulunya ada beberapa masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada juga pembangunan jln produksi susu dan pembangunan jln singio dimana sebelum pembangunan ini di dibuat ada sebagian masyarakat yang mempunyai perkebunan di seputaran jln susu dan jln singio ini jika mereka mau pergi ke kebun harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup lama,

namun dengan adanya Program dari pemerintah desa tentang pembangunan infrastruktur ini mereka sudah begitu senang jika ingin pergi ke kebun karna sudah bisa pergi dengan menggunakan kendaraan roda dua. Ada juga program pemerintah yaitu pembuatan gedung paud bagi anak-anak khususnya yang umur 4 thn yang dulunya tidak ada pembangunan gedung paud, juga ada pembangunan talut khusus di pantai sehingga para masyarakat sudah tidak takut jika air meluap karna sudah ada talut yang dapat menjaga rumah mereka yang dipinggiran pantai. Ada juga pembangunan bahu jalan untuk lindongan 1 dan lindongan 2 agar jika ada lomba kebersihan antar kampung bahu jalan yang sudah di bangun bisa di cet agar menambah memperindah kampung tersebut, juga ada pembangunan jln toka (jln pelangi) yang dibuat untuk tempat pariwisata agar dapat menambah memperindah kampung minanga dan banyak para pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada di jln pelangi tersebut. dan juga ada pembangunan saluran air di lindongan 1 dan lindongan 2.

Menurut Sters, (1985:6) Mengatakan bahwa "Efektifitas" dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai". Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil. Infrastruktur yang ada di desa minanga menurut pandangan kami sangat antusias dan menerima dengan sangat baik setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desa minanga dalam pelaksanaannya masih kurang baik atau belum terlaksana sepenuhnya, juga dalam pengawasannya masih kurang dalam pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sudah cukup baik

2. Kriteria Penentu Kebijakan Secara Efisien

Pada kriteria penentu kebijakan secara Efisien ini yakni melihat bagaimana dana atau anggaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai juga target dalam pelaksanaan pembangunan ini. Dalam pembangunan

ini setiap anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun setiap anggaran tersebut berasal dari dana desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang di rancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah, juga (APBN) anggaran pendapatan belanja negara dimana setiap program pembangunan infrastruktur di diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur,ekonomi,maupun sosial. Kemudian ada juga dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang mana merupakan salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat dan menyetujui agenda pembangunan tersebut.

Menurut handoko (1995) efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisien penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antara instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Untuk pencapaian atau target dalam pembangunan infrastruktur ini targetnya adalah dalam 30 hari- 80 hari kalender, jika para pekerja melakukan pekerjaan dengan kemampuan atau skill dari setiap individu maka proses dalam mengerjakan suatu pekerjaan akan cepat terselesaikan dengan waktu yang tepat atau efektif. Pembangunan infrastruktur di desa minanga terlaksana dengan sangat baik, semua program yang di jalankan sudah di sosialisasikan dengan para masyarakat sebelum dilaksanakannya suatu a atau pelaksanaan dalam suatu program pembangunan yang ada dan para masyarakat sangat merasa terbantu dengan pembangunan yang ada. Khususnya ada permasalahan yang muncul pada salah satu pembangunan infrastruktur yang ada di desa minanga yaitu tambatan perahu bagi para nelayan yang belum terlaksana dengan baik karna ada pro dan kontra antara masyarakat dan

pemerintah yang ada di desa mengenai tidak transparan mengenai anggaran yang belum terealisasi dengan sangat baik, dan kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

3. Kriteria Penentu Kebijakan Secara Terjawab

Dalam melaksanakan program secara terjawab mengenai masalah atau kendala yang ditemui dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yaitu program pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan ku dalam program ini sudah cukup lama belum terlaksana atau terealisasi dengan baik karna dari pihak pemerintah tidak begitu baik komunikasi antara masyarakat/nelayan dengan para pemerintah, sehingga program pembuatan tambatan perahu ini belum terlaksana dengan baik juga semenjak adanya pandemic covid 19 segala anggaran dari dana desa yang di khususkan untuk pembuatan infrastruktur di desa belum terlaksana dengan baik karna semua anggaran tersebut sudah di salurkan untuk anggaran pandemic covid 19, Sehingga ada beberapa program yang belum terlaksana dengan sangat baik. Namun dalam program pemerintah mengenai infrastruktur di desa ada yang sudah terlaksana dengan sangat baik dan terjawab sesuai dengan program yang ada.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif, dikarenakan ada beberapa faktor seperti dilihat dari tiga kriteria penentu kebijakan yang peneliti sudah bahas pada pembahasan yaitu:

1. Kriteria penentu kebijakan secara efektivitas yakni mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan alternative kebijakan. Semua program yang di bangun oleh pemerintah sudah berjalan dengan sangat baik,

Namun ada beberapa program yang di bangun oleh pemerintah dalam pelaksanaan ataupun pengawasannya masih kurang baik.

2. Pada penentu kebijakan secara Efisien Setiap program pembangunan infrastruktur yang ada di desa minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro target dalam pelaksanaan pembangunan ini sudah sangat baik juga semua program yang dijalankan sudah terealisasi dengan sangat tepat dan efektif, dan anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun semua anggaran tersebut berasal dari dana desa.
3. Dan pada kriteria penentu kebijakan secara Terjawab. Beberapa program belum terealisasi atau memenuhi kebutuhan, yakni program dari pemerintah mengenai pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan yang cukup lama belum terealisasi dengan baik namun setiap program pemerintah mengenai infrastruktur di desa sudah terlaksana dengan sangat baik dan terjawab sesuai dengan program yang ada.

Saran

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro d kesimpulan yang ditarik yaitu:

1. Harus diperhatikan terlebih khusus setiap program yang terlaksana dan juga di setiap program yang dijalankan oleh pemerintah harus ada sosialisasi mengenai program yang dibangun.
2. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai setiap program yang di bangun agar masyarakat merasa puas dengan setiap program yang dijalankan oleh pemerintah.
3. Kirannya dalam setiap program yang dibangun oleh pemerintah desa semuanya bisa berjalan dengan sangat baik.

Daftar Pustaka

- Andi Asnudin, 2004, " Tinjauan Proses Pengadaan Kontraktor skala kecil dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Institut Teknologi Bandung-Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aprilia Theresia dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Afifudin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bawazier, Fuad. 2007. "Dilema pembangunan Infratraktur Di Indonesia" dalam detiknews, 21 februari 2017.
- Baharudin. Kepmen Desa PDTT Nomor 16 Tentang: Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan public* . Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Volume 2 No. 1
- Dilla. S. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu : Simbosa rekatama mediaanti*
- KPPIP. 2016. *Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*. Jakarata : KPPIP.
- Kodoatie, R. J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan politik, ekonomika Pembangunan*. Erlangga. Jakarta
- Moleong, Ixey J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Muni, Fahmal, A, "Peran asa-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih" Pen. Kreasi Total Media. Yogyakarta. Cet. Ke-dua, 2008
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.Vol. 2 No.1
- Noeng Muhadjir, *ilmu Pendidikan dan Perubahan social . Teori Teori Pendidikan pelaku social Kreatif* . Yogyakarta : Raka Sarasin, tahun 2000, hal. 15
- Noeng H, Muhadjir *Metodologi Penelitian kebijakan dan evauasi Research* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) p.90
- Rochajat Harun. 2012 . *Komunikasi Pembangunan dan perubahan Sosial*. Rajawali pers. jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan-pendekatan Kualitataif* Bandung: Alvabeta CV.
- Sondang P, Sagian, *Manajemen sumber daya manausia*, Bumi Aksara, Jakarta.,
- Satria, Arif, dkk. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta, Cidensindo.
- Steers, M. Richard . 1985. *Efektivitas Organisasi Bandung* : Erlangga
- Susilowati dan Sumarto . 2010 *membangun Loyality melalui Brand Trust customer Satisfaltin*. Riset Ekonomi. Vol. 10 no. 1
- Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, *Politik, Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara press.
- Weenas. A. Nanda.2015. *Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur*. Kabupaten Minahasa Utara Desa Karegesan.
- Yusniah Anggraini *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan infrastuktur di indonesia*

Sumber lainnya:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasan Undang
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Surabaya: Lima Bintang.